

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengevaluasi kebijakan pelaksanaan *e-office* di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan *e-office* di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, secara umum belum terlaksana dengan optimal. Disamping itu berdasarkan hasil evaluasi kebijakan dapat disimpulkan juga kebijakan tersebut masih layak untuk diteruskan, dengan catatan perlu penambahan regulasi lainnya agar pelaksanaan *e-office* di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat berjalan dengan optimal. Berikut ini adalah kesimpulan khusus berdasarkan aspek penelitian.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur (SDA)

SDA dalam hal ini pengguna Aplikasi *E-Office* sudah menggunakan aplikasi tersebut dengan baik dan mengerti cara kerja aplikasi tersebut. Hal ini dikarenakan sudah pernah dilakukan sosialisasi pelaksanaan *e-office*. Namun, masih ada beberapa pejabat struktural yang belum menggunakan aplikasi ini padahal akun pengguna *e-office* ini jumlahnya terbatas. Pengguna yang bisa menggunakan aplikasi tersebut adalah pejabat struktural saja. Meskipun masih ada kendala dalam keterbatasan penggunaan akun, tetapi aplikasi ini tetap memiliki banyak manfaat yang diperoleh setelah ditetapkan *E-office*, sehingga

dapat meningkatkan kualitas dan kinerja SDA di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

2. Aspek Kelembagaan

Koordinasi antar jenjang eselon dalam pelaksanaan *e-office* sudah dijalankan dengan baik melalui beberapa *platform* media sosial seperti grup *whatsapp* di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Namun demikian, keterlibatan unit lain kurang dimanfaatkan dalam penerapan aplikasi *e-office* ini, seperti Pusat Data dan Sistem Informasi.

3. Aspek Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Aspek sarana, prasarana, dan teknologi yang digunakan sudah cukup baik dan jaringan internet yang stabil digunakan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Namun, terdapat kendala yakni Aplikasi *E-office* versi *mobile apps* yang masih belum tersedia, fitur-fitur yang terbatas, dan keterbatasan jumlah akun pengguna. Selain itu, meskipun jaringan internet relatif stabil, tetapi kadangkala jaringan *down* dan kecepatan *bandwith* melemah saat terjadi *traffic* penggunaan jaringan internet.

4. Aspek Finansial

Untuk aspek finansial telah cukup baik diakomodir oleh pimpinan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang mendukung penuh secara finansial dalam pelaksanaan dan

pengembangan Aplikasi *E-office*. Namun, anggaran yang digunakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan, banyak pejabat struktural yang belum menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga anggaran *license* akun pengguna aplikasi *e-office* menjadi tidak terpakai dengan maksimal. Hal ini patut disayangkan, karena kurang optimalnya pemanfaatan kuota akun pengguna pada aplikasi *e-office* padahal telah ada dukungan anggaran yang besar dari pimpinan di Kemenparekraf.

5. Aspek Regulasi

Untuk aspek regulasi masih terdapat kekurangan, yakni terbatasnya regulasi pendukung yang mendukung kebijakan pelaksanaan *e-office* di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Saat ini baru ada kebijakan yakni Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor SK.11/UM.001/SESMEN/KEMPAR/2015 tentang Penggunaan dan Penerapan Aplikasi E-Office di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor UM.001/36/25/SETMEN/KEMPAR/2015 tentang Penerapan Aplikasi *E-Office* di Lingkungan Kementerian Pariwisata. Sementara regulasi pendukung seperti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) belum diterbitkan.

B. Saran

Untuk lebih memperkuat eksistensi kebijakan tersebut mengingat masih banyaknya manfaat yang telah diberikan bagi organisasi, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur

Disarankan kepada pimpinan di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama untuk menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, peningkatan *capacity building* bagi pengguna. Sehingga tidak ada lagi pengguna yang tidak bisa menggunakan Aplikasi *E-Office* dengan maksimal. Selain itu, perlu ditambahkan akun pengguna *e-office* serta perlu diterapkan *punishment* (hukuman) kepada pejabat struktural yang tidak menggunakan akun Aplikasi *E-office* nya. Hal tersebut dilakukan agar memberi efek jera dan menerapkan kewajiban untuk menggunakan aplikasi *e-office* tersebut.

2. Aspek Kelembagaan

Perlu dioptimalkan keterlibatan unit lain seperti Pusat Data dan Sistem Informasi dalam rangka pengembangan aplikasi *e-office*. Pusat Data dan Sistem Informasi menaungi banyak ASN dengan jabatan fungsional Pranata Komputer yang kompetensinya dapat diberdayakan untuk mengembangkan Aplikasi *E-Office*, sehingga tidak tergantung lagi dengan pihak luar (pihak ketiga). Selain itu, perlu dibutuhkan tim untuk mengevaluasi kebijakan terkait pelaksanaan Aplikasi *E-Office*. Dari hasil evaluasi tersebut diharapkan didapat

kesimpulan terkait apakah kebijakan tersebut perlu dikembangkan, diteruskan, direvisi, atau tidak digunakan lagi.

3. Aspek Sarana, Prasarana dan Teknologi

Perlu dilakukan pengembangan Aplikasi *E-office* berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang sudah dilakukan, agar hasil dari pengembangan aplikasi tersebut maksimal dan tepat sasaran. Untuk jaringan internet perlu diperhatikan kecepatannya, jangan sampai berkurang dan *down server*nya. Untuk lebih menstabilkan jaringan internet perlu dijaga kecepatan internetnya jangan sampai di bawah 100 *mbps* dan untuk server perlu dilakukan *maintenance* secara berkala. Selain itu, aplikasi juga harus dapat diintegrasikan dengan beberapa aplikasi lain yang ada saat ini, seperti SIMPEG (sistem informasi kepegawaian) dan e-mail. Karena adanya sistem aplikasi yang terintegrasi menjadi penilaian penting dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kemenpan RB.

4. Aspek Finansial

Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi anggaran dalam pelaksanaan *e-office*. Agar anggaran besar yang sudah dikeluarkan, sesuai dengan hasil yang ingin dicapai dan tidak menjadi kerugian negara. Daya cakup anggaran terkait jumlah pengguna Aplikasi *E-Office* perlu dioptimalkan. Agar, jangan sampai terjadi akun pengguna yang sudah dibagikan tidak terpakai.

5. Aspek Regulasi

Agar dapat menguatkan pelaksanaan Aplikasi *E-office* di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, maka perlu diterbitkan regulasi pendukung seperti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Aplikasi *E-office*, dan SOP Penggunaan Aplikasi *E-office*. Regulasi tersebut dibutuhkan, untuk pelaksanaan *e-office* yang sesuai dan tepat sasaran.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Said Zainal (2016), *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo (2017), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfa Beta.
- Anggaraeni, Elisabet Y (2017), *Pengantar Sistem Informasi*, Yogyakarta: ANDI.
- Dunn, William (2013), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrajit, Richardus Eko (2009), *Pengantar Konsep Dasar Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Jakarta: STIMIK Perbanas.
- Irawan, Prasetya (2004), *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA LAN Press.
- Kasmad, Rulinawaty (2018), *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Semarang: Kedai Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Politeknik STIA LAN (2017), *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Terapan*, Jakarta: STIA LAN Press.
- Rusli, Budiman (2013), *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung: Hakim Publishing.
- Situmorang, Chazali (2016), *Kebijakan Publik: Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*, Depok: Social Security Development Institute.
- Sugiyono (2018), *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurokhman (2014), *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Press.
- Tayibnapis, F.Y. (2000), *Evaluasi Program*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Winarno, Budi (2012), *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: CAPS.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata Nomor SK.11/UM.001/SESMEN/KEMPAR/2015 tentang Penggunaan dan Penerapan *E-Office* di Lingkungan Kementerian Pariwisata.

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pariwisata Nomor UM.001/36/25/SETMEN/KEMPAR/2015 tentang Penerapan Aplikasi *E-Office* di Lingkungan Kementerian Pariwisata.

C. Dokumen

- Asisten Deputi Litbang Kebijakan Kepariwisata (2015) *"Blueprint/Rencana Pengembangan TIK di Kementerian Pariwisata Tahun 2015"*.
- Aplikasi SAS Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020) *"Daftar Rincian Anggaran Pengembangan dan Pelaksanaan E-Office"*.
- Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi (2019) *"Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Aplikasi E-Office Tahun 2019"*.
- Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (2020) *"Rencana Pengembangan Aplikasi E-Office di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020"*.
- Telkom Indonesia (2015), *Buku Panduan E-Office Automation Kementerian Pariwisata*, Jakarta: Telkom Sigma.
- Telkom Indonesia (2017) *"Laporan Pekerjaan E-Office Kementerian Pariwisata Tahun 2017"*, Jakarta: Telkom Sigma.
- Telkom Indonesia (2020) *"Laporan Pekerjaan E-Office Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020"*, Jakarta: Telkom Sigma.

D. Jurnal

- Andriariza, Yan (2016), *Evaluasi Implementasi Media Center di Kota Bekasi*, Jurnal Pekommas, Volume 1 No. 2, Jakarta: Puslitbang Aptika dan IKP, Kementerian Kominfo.
- Anggraeni, Ratih; Soesilo Zauhar, dan Siswidiyanto (2018), *Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1, Malang: Universitas Brawijaya.
- Erhan, Noviandi; Mardiyono, Romy Hermawan, dan Hideaki Ohta (2017), *Evaluation of E-Government Implementation in Indonesian Local Government (Case Study of the Implementation of Electronic Monitoring and Evaluation in Balangan Local Government)*, Journal of Public Administraction Studies, Volume 1 No. 4, Malang: Brawijaya University.

Fitri Wahyuni dan Angraini (2015), *Evaluasi Penerapan E-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Menggunakan Pendekatan Metode PEGI*, Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, Volume 1 No. 1, Riau: UIN SUSKA Riau.

Sitokdana, Melkiro N. N. (2015), *Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura*, Jurnal Buana Informatikan, Volume 6 No. 4, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Suhari, Alfira Sofia, dan Agustinus Andriyanto (2015), *Evaluating e-Government and Good Governance Correlation*, J.ICT Res. Appl. Volume 9 No. 3, Bandung: Institut Teknologi Bandung.

E. Skripsi

DP., Wisnu, M. (2019), *Implementasi Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Universitas Negeri Jakarta*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN).

Hendrawan, Martino Kurnianto (2014), *Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Klausul 6 Pada Pusat Penelitian Mutu dan Teknologi Pengujian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN).

Putri, Irna Anggraeni (2014), *Kinerja Subbagian Perpustakaan Dalam Implementasi Aplikasi Sipuspa Pada Kantor BPK RI*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN).

Putri, Riskiria (2019), *Pengaruh Penerapan Sistem Absensi Sidik Jari (Finger Print) Terhadap Disiplin Pegawai Pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN).

F. Website

Eoffice.kemenparekraf.com (2020, 28 Juli). *Manual Book Penggunaan Aplikasi E-Office Kemenparekraf*, Diakses pada 28 Juli 2020, dari <https://www.eoffice.kemenparekraf.go.id>.

Jdih.kemenparekraf.com (2020, 5 Agustus). *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Diakses pada 5 Agustus 2020, dari <https://jdih.kemenparekraf.go.id/Dokumenhukum/Detail/639>.

Speedtest.net (2021, 21 April). *Result Test Speed Internet*, Diakses pada 21 April 2021, dari <https://www.speedtest.net/result/11804141250>.

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**